

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Mardiyono (2017) di dalam penelitiannya yang berjudul “Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur (Studi Di Kota Malang Dan Kabupaten Bondowoso)”, Upaya pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan program keluarga berencana dilakukan dengan membentuk kampung keluarga berencana. Masyarakat sendirilah yang menjadi landasan seluruh operasional kampung KB. Selain itu, keterlibatan beberapa lembaga sangat penting di kampung KB untuk memastikan bahwa masyarakat terkena dampak langsung dari semua layanan. Sebagai hasil dari diskusi ini, desa KB kini dapat dilihat sebagai inisiatif masyarakat dan bukan sekedar program pemerintah. Kemampuan program desa untuk mencapai tujuan akhir berupa gerakan budaya yang komunal dan langgeng sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, pendanaan, fasilitas dan infrastruktur, KIE, advokasi, serta gerakan dari SKPDKB dan sektor lainnya.

Untuk mengembangkan program kampung KB dan menjamin kesinambungannya, Bupati dan Tim Pokja termasuk DPRD, menjadi pihak yang memiliki kontribusi yang krusial. Metodologi yang digunakan dalam penelitian berjenis evaluatif dan deskriptif yang melakukan investigasi untuk menilai efektivitas kampung KB dengan cara melakukan telaah terhadap proses pelaksanaan program, yang dilakukan dengan mengidentifikasi, mengintervensi, melakukan pemantauan serta pelaksanaan tinjauan atas program yang telah dilaksanakan. Dari pembahasan jurnal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah PLKB/PKB belum sebanding dengan keberhasilan input di wilayah kampung KB, Kecamatan Kotalama, Kota Malang; Pasca program kampung KB ditetapkan, seluruh tim bekerjasama menyukseskan program-program di daerahnya dan

mendapatkan bantuan dari para komponen yang mempunyai motivasi tinggi menyuksekkannya.

Menurut Raikhani et al. (2018) di dalam jurnal yang berjudul “Analisa Kontribusi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur”, menjelaskan bahwa rahasia kemakmuran rakyat adalah pembangunan. Demi kepentingan masyarakat, pemerintah harus mempercepat pertumbuhan. Salah satu inisiatif yang membantu pembangunan adalah Desa KB. Seluruh organisasi pemerintah dan dunia usaha jika memungkinkan harus membantu pembentukan Kampung Keluarga Berencana agar dapat memenuhi kebutuhan dan kondisi masyarakat sekitar. Salah satu realisasi pemerintah dalam mensejahterakan penduduknya sejalan dengan KPI KKBPK melalui program keluarga berencana.

Pendekatan kualitatif dengan metodologi eksploratif digunakan untuk menunjang penelitian. Penulis memanfaatkan model tinjauan langsung kondisi nyata serta diperkuat dengan komunikasi dengan pihak-pihak terkait (Wawancara), dengan maksud mengumpulkan data-data yang diperlukan. Berdasarkan temuan penelitian, kampung KB telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sejumlah metrik program KKBPK sejak diluncurkan pada tahun 2016, termasuk peningkatan jumlah akseptor KB baru. Namun mengingat masih kuatnya ego sektoral antar pemangku kepentingan terhadap program dan anggaran, maka kontribusi tersebut belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kemauan politik dan model sinergi antar pemangku kepentingan saat ini. Selain itu keberhasilan program Kampung Keluarga Berencana juga tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan potensi yang sudah ada.

Menurut Widya Saputra et al. (2019), dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda” menjelaskan bahwa Dibandingkan negara lain, Indonesia kini menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal pertumbuhan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia berdampak pada banyak aspek

kehidupan, termasuk bidang sosial dan ekonomi. Memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan unggul merupakan salah satu aset fundamental dan pendorong utama pertumbuhan suatu negara. Kemudian, masyarakat yang cukup besar dan unggul mungkin akan terdorong untuk mendukung pelaksanaan inisiatif pemerintah. Program-program yang berkaitan dengan bidang kependudukan merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh inisiatif pemerintah tersebut. BKKBN menjadi satu diantara beberapa partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi deskriptif. penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengkarakterisasi fenomena dan hal yang ingin diteliti. Tujuan penelitian deskriptif adalah menjelaskan secara lisan pengamatan yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan deskripsi dan ilustrasi. Temuan Penelitian: BKKBN membentuk Kampung KB yang tersebar di seluruh tingkat Kabupaten/Kota Kalimantan Timur dan bekerja sama dengan BKBPP Kota Samarinda yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Jenis implementasi yang dilakukan antara lain penyediaan alat kontrasepsi kepada masyarakat, pemantauan pelaksanaan setiap program di Kampung KB, dan infrastruktur pelayanan yang akan diberikan ke setiap wilayah Kota Samarinda. Selain itu tantangan yang harus diatasi adalah dana dan kehadiran insan PLKB di lapangan. Atas dasar tersebut, kedepannya pelaksanaan program Kampung KB di Kota Samarinda harus ditingkatkan.

Menurut Restiyani & Murjana Yasa (2019), di dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota Denpasar”, menjelaskan bahwa Keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengendalikan jumlah anak yang dilahirkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tujuan dari program keluarga berencana adalah untuk memperlambat pertumbuhan penduduk. Melalui APBN dan APBD, pemerintah mengalokasikan anggaran yang meningkat setiap tahunnya dalam

upaya menjamin keberhasilan program keluarga berencana. Untuk merevitalisasi inisiatif keluarga berencana, pemerintah memperkenalkan konsep baru yang disebut Kampung KB.

Kampung KB merupakan reorientasi strategi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas penduduk serta memperlambat laju pertumbuhan penduduk. Mengingat keluarga merupakan unit sosial terkecil, maka penting untuk memikirkan cara meningkatkan kesejahteraan keluarga karena keluarga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan yang efektif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan teknik analisis faktor konfirmatori yang meliputi Measures of Sampling dan uji Kaiser Meyer Olkin (KMO) atau Barlett. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inisiatif Desa Keluarga Berencana Kota Denpasar belum berhasil dilaksanakan. Keberhasilan program Kampung KB dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pendidikan istri dan fungsi petugas KB. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana akan meningkat seiring dengan tingkat pendidikan istri dan tingkat aktivitas petugas KB.

Kesejahteraan keluarga berpendapatan rendah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pendidikan istri, namun secara positif dan minimal dipengaruhi oleh pekerjaan petugas KB. Kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah di Kota Denpasar dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh keberhasilan inisiatif Kampung Keluarga Berencana. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah di Kota Denpasar dipengaruhi secara tidak langsung oleh tingkat pendidikan istri dan pekerjaan petugas KB.

Menurut Angisna (2018) di dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi efektivitas Pelatihan Kampung KB di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur” menjelaskan bahwa Pendidikan istri mempunyai dampak yang baik dan besar terhadap kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah; Meski demikian, pekerjaan petugas KB mempunyai dampak yang positif dan tidak terlalu besar. Kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah di Kota Denpasar terkena

dampak positif dan signifikan dari keberhasilan inisiatif Kampung Keluarga Berencana. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah di Kota Denpasar dipengaruhi secara tidak langsung oleh latar belakang pendidikan pasangan dan aktivitas petugas KB.

Pelaksana KB desa di daerah mendapatkan pelatihan di beberapa tingkatan. Oleh karena itu, peserta pelatihan dibekali materi berdasarkan tugas pokok atau jenjang yang berlaku, sehingga memudahkan pemahaman dan penerapan praktik pelatihan. Pelatihan di kampung KB dimaksudkan untuk memfasilitasi koordinasi antar sektor atau organisasi terkait pembangunan, sehingga rencana lapangan dan pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan metode observasional deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai suatu gejala atau permasalahan yang berkaitan dengan tujuan penyelidikan, yang diperkuat dengan adanya penggunaan kuesioner.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa latar belakang peserta pelatihan cocok untuk menerima pengajaran berdasarkan ciri-cirinya. Berdasarkan temuan sebelum dan sesudah tes, terdapat peningkatan pengetahuan sebesar 33,9%. Empat puluh lima dari 53 peserta melaporkan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai topik tersebut. Hasil evaluasi peserta menunjukkan bahwa dari 45 peserta, mayoritas berkompeten tinggi dalam menjawab soal-soal peningkatan kapabilitas dengan dampak yang dihasilkan berupa peningkatan kapabilitas sebesar 84,91%. Selain itu, sebagian isi pertanyaan dinilai peserta kurang jelas, artinya masih ada informasi yang kurang atau pengurangan kesalahan yang kurang.

Menurut Yunas & Nailufar (2019) di dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Collaborative Governance Melalui Program Kampung Kb Di Kabupaten Jombang” menjelaskan bahwa Salah satu contoh langkah yang dilakukan dalam upaya perbaikan terhadap kehidupan masyarakat sebagaimana tolok ukur penyelesaian program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) adalah program kampung keluarga berencana. Dua

pendekatan untuk menilai efektivitas program adalah penurunan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas, yang ditentukan oleh peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga warga. Program tersebut, menjadi bukti bagaimana pemerintah melakukan inisiatif perbaikan terhadap kehidupan masyarakat sebagaimana program KPI KBBPK. Efektivitas pelaksanaan program bisa ditinjau dengan dua cara: dengan mengurangi jumlah penduduk atau dengan meningkatkan standar layanan yang diberikan kepada penduduk, seperti yang ditunjukkan oleh ketahanan dan kesejahteraan keluarga penduduk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif. Peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk mengumpulkan data selama ini. Berdasarkan temuan penelitian, program KKBPK seringkali diperkuat dengan keberadaan Kampung KB. Sekalipun masih banyak tantangan dalam operasional dan koordinasi keuangan, kemitraan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat Sipil, sektor korporasi, dan masyarakat memberikan kekuatan besar bagi program ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, solusi yang disarankan dalam artikel ini mencakup memperkuat anggaran dan menciptakan sebuah platform yang dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi di antara semua pemangku kepentingan terkait untuk mempersiapkan dan melaksanakan tinjauan secara berkala.

Menurut Nurjannah & Susanti (2018) di dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 (Studi Kuantitatif Dan Kualitatif)” menjelaskan bahwa peningkatan populasi dunia menjadi problematik yang signifikan bagi rata-rata negara di dunia, khususnya negara yang masih berkembang. Indonesia menjadi negara yang secara defacto menjadi negara dengan populasi terbesar nomor empat jika dibandingkan negara lainnya. Badan Pusat Statistik merilis data pada tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 adalah 258.704.900 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 238.518.800 orang, angka ini

meningkat sebesar 20.186.200 orang atau sekitar 8,5%. Karena desa-desa merupakan induk dari desa-desa lain, maka masuk akal jika perluasan populasi dimulai di lokasi-lokasi yang paling terpencil. Setiap pertumbuhan desa pada akhirnya akan membawa kemajuan desa, dan jika setiap desa tumbuh maka niscaya negara akan maju pula.

Teknik hibrida yang menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif memungkinkan penelitian ini dilakukan. Adapun hasil dari pelaksanaan program setelah dilakukan evaluasi ditemukan bahwa program terlaksana sesuai dengan target, terlihat dari kondisi akseptor KB yang terus melonjak dari 5.244 menjadi 5.519 baik sebelum maupun sesudah terbentuknya program. Setelah itu, sebagian besar kegiatan terkait program KB selesai, antara lain Pembinaan Keluarga, UPPKS, penyuluhan, dan pendirian pusat informasi dan konseling remaja. Namun demikian, penyelidikan kualitatif ini menemukan sejumlah permasalahan, termasuk kurangnya dukungan dan pengetahuan masyarakat serta kurangnya kolaborasi antar karyawan sumber daya manusia yang bekerja di bidang ini.

Menurut Prasetyo et al. (2020) di dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera di Kampung KB” menjelaskan bahwa jika tidak ditangani dengan tepat, kepadatan penduduk akan menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius. Untuk itu pemerintah yang diwakili oleh BKKBN menetapkan program Kampung Keluarga Berencana yang berkolaborasi bersama lintas sektoral dan pelayanan masyarakat lainnya, antara lain dinas kesehatan, pendidikan, dan pertanian, dengan tujuan untuk mengembangkan desa di Dusun. /tingkat RW.

Program Keluarga Berencana Desa merupakan salah satu inisiatif desa terpadu yang dijalankan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak-anak guna mendorong rumah tangga kecil yang bahagia dan sukses. Masyarakat yang berkembang dibangun berdasarkan keluarga-keluarga ini, dan penurunan angka kelahiran akan berkontribusi terhadap tujuan ini.

Pendekatan adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode kualitatif diperuntukkan dalam penelitian ini dan didukung dengan pendekatan deskriptif. Adapun penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut penelitian penulis, partisipasi masyarakat secara keseluruhan atas program-program yang telah terlaksana di Kampung KB berjalan sesuai rencana, karena semua masyarakat menerima dan berpartisipasi dalam kegiatan yang ditawarkan oleh program tersebut, dan masyarakat merasakan manfaat dari adanya program tersebut. dan memberi manfaat bagi masyarakat dan komunitas; Meski demikian, beberapa orang tetap merasakan dampaknya secara tidak langsung. Setiap tahunnya, seluruh kegiatan di Kampung KB ditingkatkan dan ditingkatkan.

Menurut Zuhriyah et al. (2017) di dalam penelitiannya yang berjudul “Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana” menjelaskan bahwa Program keluarga berencana dapat membantu memperlambat laju pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat di Jawa Tengah. Tujuan penumbuhan gerakan keluarga berencana nasional adalah untuk meningkatkan taraf sumber daya manusia. Salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah adalah konsep desa keluarga berencana. Kampung Keluarga Berencana merupakan versi skala kecil dari keseluruhan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), yang dilaksanakan di tingkat pemerintahan paling bawah di seluruh kabupaten dan kota. Melibatkan seluruh sektor di lingkungan BKKBN dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan instansi terkait, kementerian, dan lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dipadukan dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Kajian ini fokus pada evaluasi program desa KB dari sudut pandang pemberdayaan, dengan memperhatikan masukan, prosedur, dan hasil pemberdayaan desa KB. Setelah

perdebatan, diputuskan bahwa masukan program tidak sesuai dengan indikator karena dana kegiatan dan sumber daya manusia tidak mencukupi. Karena kegiatan kampung KB dilakukan bersamaan dengan aksi PKK, sehingga tidak mengikuti rencana aksi yang telah ditetapkan. Dari dua puluh indikator keluaran, hanya sepuluh yang terpenuhi. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana dan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan kegiatan.

Menurut Iryanto et al. (2021) di dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang 2019-2020 (Studi Kasus Di Kelurahan Dompok)” menjelaskan bahwa Kota Tanjungpinang menjadi salah satu tempat yang pertumbuhan penduduknya terjadi paling cepat saat ini. Kota Tanjungpinang memiliki 149.354 penduduk pada tahun 2019 dan 220.802 penduduk pada tahun 2020, menurut statistik resmi. Terdapat 76.078 perempuan dan 73.267 laki-laki pada tahun 2019 dengan jumlah 149.354 orang. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 220.802 jiwa dengan rincian 121.451 laki-laki dan 99.351 perempuan. Program Kampung Keluarga Berencana yang salah satunya terletak di Kecamatan Dompok dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang karena pesatnya pertumbuhan penduduk kota tersebut.

Desa Dompok telah mematuhi keputusan Lurah Dompok Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengurus Keluarga Berencana Desa; Namun informasi seperti pelatihan dan sosialisasi diperlukan bagi kader dan pengurus, khususnya pada Program Keluarga Berencana Desa, dimana pelaksanaannya dianggap harus menguasai petunjuk teknis yang ada. Karena kegiatan tersebut diharapkan masuk dalam Program KB Desa, maka Juknis KB Desa juga sangat diperlukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelatihan harus diberikan secara berkesinambungan dan merata. Standar tersebut disebut Juklak (petunjuk pelaksanaan).

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Pelaksanaan

Kata implementasi berasal dari kata implementasi yang berarti melaksanakan atau menyelesaikan suatu tindakan. Proses, teknik, tindakan melaksanakan suatu rencana, keputusan, dan lain sebagainya, semuanya dianggap sebagai bentuk pelaksanaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Suatu tindakan yang dimulai dengan strategi yang dipikirkan dengan cermat adalah definisi umum dari implementasi. Biasanya implementasi terjadi setelah rencana dianggap siap. Implementasi dapat dilihat hanya sebagai implementasi (Abdullah, 1987). Selain itu, implementasi juga merujuk pada proses pelaksanaan seluruh kebijakan dan strategi yang direncanakan dan dikembangkan.

Menurut Anggowo (2008), terdapat 4 fungsi pelaksanaan, di antara lain:

- a. Menetapkan sistem kepemimpinan, bimbingan, dan motivasi karyawan sehingga mereka dapat bekerja secara produktif dan berhasil mencapai tujuan.
- b. Berikan tugas rutin dan penjelasan terkait pekerjaan.
- c. Jelaskan kebijakan yang ada.
- d. Prosedur untuk melaksanakan program sehingga setiap orang yang terlibat dalam organisasi dapat melaksanakannya.

Menurut Sukarna (2011) faktor-faktor yang menentukan dari suatu pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Seni kepemimpinan.
- b. Moralitas dan sikap (moral and attitude).
- c. Koneksi Interpersonal (Bicara).
- d. Suatu bujukan (stimulus).
- e. Pemantauan (Pemantauan).
- f. Pengendalian diri (Disiplin).

2.2.2 Strategi

Kata "*strategos*" memiliki etimologi Yunani dan mengacu pada konsep Yunani kuno "*strategos*", yang merupakan upaya untuk memenangkan pertempuran. Selain itu, "*strategos*" dalam konteks demokrasi Athena juga bisa berarti "panglima militer". Ketika istilah "*strategis*" pertama kali digunakan, istilah ini berarti menggunakan segala taktik militer yang memungkinkan untuk memenangkan pertempuran.

Menurut James C. Craig (1996) di dalam bukunya, Seni strategi berkaitan dengan pengorganisasian pergerakan tentara, kapal, dan kekuatan militer lainnya menuju lokasi strategis. Hal ini juga mencakup pembuatan rencana aksi atau kebijakan untuk bidang politik dan korporasi. Selain itu, strategi melibatkan identifikasi target dan sasaran jangka panjang perusahaan serta tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target dan sasaran tersebut (mencapai sasaran dan sasaran).

Menurut Johnson et al. (2009) Strategi organisasi adalah arah dan ruang lingkup jangka panjang, yang dicapai dengan mengkonfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menuntut untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan dan permintaan pasar. Akibatnya, strategi terutama berfokus pada bagaimana manajemen senior memilih visi, tujuan, filosofi, dan strategi jangka panjang organisasi.

Berdasarkan sudut pandang para ilmuwan tersebut, strategi adalah rencana jangka panjang yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan pemerintah untuk berhasil melaksanakan inisiatifnya sangat bergantung pada strateginya. Kapasitas pemimpin untuk merancang rencana tindakan yang tepat menentukan kemungkinan keberhasilan strategi tersebut.

Strategi yang dirancang BKKBN Kabupaten Magetan adalah dengan membangun komitmen, penyusunan profil wilayah, proses penetapan wilayah sebagai kampung KB, penyediaan data dan informasi, serta membentuk

kelompok kerja (pokja). Hal itu sejalan dengan KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/199/Kept./403.013/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAGETAN (2017).

Tujuan kelompok kerja ini adalah untuk: a) meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kesehatan reproduksi; b) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan yang berorientasi pada kependudukan; c) memperkuat ketahanan keluarga melalui inisiatif seperti Program Pembinaan Keluarga Balita (BKB), Pembinaan Keluarga Remaja (BKR), Pembinaan Keluarga Lanjut Usia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK); d) penguatan pemberdayaan keluarga melalui Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan e) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keluarga berencana dan mendukung keberlanjutannya; penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); meningkatkan kesehatan masyarakat; meningkatkan capaian pendidikan anak usia sekolah; dan meningkatkan sarana dan prasarana. meningkatkan kualitas keimanan remaja dalam kegiatan keagamaan (pondok pesantren, kelompok ibadah, kelompok salat, dan pengajian di Pusat Informasi dan Penyuluhan Remaja (PIK KRR)/kelompok remaja); meningkatkan sanitasi, mewujudkan lingkungan desa yang bersih dan sehat; dan meningkatkan rasa persahabatan dan cinta tanah air remaja dalam kegiatan sosial budaya.